

Aksi Kamisan jam 16.00-17.00 di depan Istana Presiden (26 April 2007, Kamis ke XV)

**JANGAN KOTORI INDONESIAKU DENGAN KEKERASAN**  
(Negara mesti menjadi pelindung untuk kebebasan dan demokrasi)

*Korban Lumpur lapindo disweeping saat akan aksi ke Jakarta, Praja-Praja sekolah calon "camat" terus berguguran karena dipukuli seniorinya, Aktifis pembela HAM tewas karena konspirasi, para "Tapol" terus diintai dan mendapat stempel buruk seumur hidupnya, Anak Jalanan dipukulin Trantib karena cari uang di lampu merah, dan rakyat miskin menjerit karena satu-satunya rumah dan pekerjaan mereka digusur dan diratakan dengan tanah....*

Begitu banyak cerita tentang orang-orang yang direnggut haknya. Mengalami penderitaan berkepanjangan dan tersisih karena dijerat oleh manusia-manusia yang senang bersekongkol dengan uang, dan buta bahwa sedemikian rakyat teraniaya karena sistem yang timpang dan sarat dengan KEKERASAN ini.

Teriakan damai, *Peace!*, rukun, anti kekerasan, seperti dianggap angin lalu saja. Setiap hari negara sebagai pelaku utama kekerasan terus melahirkan (mereproduksi)nya. Selalu saja ada alasannya. Untuk memelihara ketertiban sosial, untuk menegakkan undang-undang/PERDA, sebagai upaya pendisiplinan, untuk memelihara kepatuhan dan nasionalisme, atau untuk menjaga kepercayaan investor atau pemodal !

Yang terakhir itulah yang paling tepat dijadikan alasan utama. Kenapa? Negara butuh masyarakat yang patuh. Karena Indonesia begitu bergantung dengan uang hasil hutang, investasi pabrik-pabrik, industri dan gaya hidup ala tuan dan nyonya "Londo". Catatan penting : secara keseluruhan Indonesia kini menanggung beban utang sekitar Rp2.100 trilyun! Dan praktis terpuruk menjadi negara pengutang terbesar nomor lima di dunia. Rakyatlah yang menanggung beban semua ini. Karena harga terus merambat naik, sementara negara seringkali masih bertindak ala "centeng" modal.

Kita lihat, Selama Orde Baru berkuasa dan Jendral Soeharto naik ke tampuk pimpinan, gaya hidup ala militer diterapkan di setiap lini. Indoktrinasi, penataran, "seragamisasi", pembentukan ormas-ormas ala preman, sampai kewajiban latihan baris berbaris, menjadi agenda utama untuk melanggengkan kekuasaan mereka. dan anehnya praktik ini sebagian besar masih dilangsungkan dan banyak memakan korban. Tidak heran kenapa ada banyak orang di masyarakat kita begitu mengagungkan kekerasan, seragam loreng, pedang, aturan militer, dan lagi-lagi bahasa kekerasan yang sering dipakai.

Kasus-kasus dimana rakyat kecil dirugikan tidak tertangani, bahkan seringkali pendekatannya masih militeristik. Sebagai contoh 1 tahun bencana sidoharjo rakyat justru mendapat intimidasi, kasus munir yang melingkar-lingkar penanganannya, eks tapol yang masih dianggap warga kelas 2, kasus IPDN yang hampir saja ditutup-tutupi dan yang paling mengenaskan rakyat masih saja tergusur dengan cara kekerasan dan tidak manusiawi, dan masih banyak kasus yang lainnya

Kami menilai sudah saatnya kita betul-betul mengubah sistem di negara kita yang masih kental menganut cara-cara kekerasan. Aktifis, beserta rakyat yang berjalan di rel gerakan sosial harus bersuara lantang bahwa **KAMI MUAK DENGAN KEKERASAN !, dan KAMI ANTI DENGAN PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS!**

Karena kami cinta indonesia, maka kami menyerukan :

- Negara harus secepatnya menyelesaikan kasus pembunuhan Aktifis HAM Munir.
- Negara mesti menghentikan tindak diskriminasi terhadap mantan TAPOL, karena sebagai warga Indonesia mereka punya hak yang sama seperti yang lainnya.
- Negara harus menghentikan cara-cara kekerasan seperti menggusur rumah dan lapak, menggaruk becak, dan menangkap anak jalanan karena mereka butuh hak hidup dan perlindungan dari negara.
- Secepatnya pemerintah menyelesaikan Kasus lumpur Sidoharjo, dan tidak bisa lagi menghalang-halangi orang lain menyampaikan aspirasinya.
- Negara mesti secepatnya menyelesaikan kasus kekerasan seperti di IPDN, menangkap pelaku bukan melindunginya, dan mengevaluasi institusi ini secara keseluruhan.
- Negara harus menindak Organisasi-organisasi ala preman yang kerap mengintimidasi kelompok Pro demokrasi.

**Jaringan Rakyat Miskin Kota, Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tragedi Trisakti Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998, Tragedi Penculikan Aktifis 1997/1998, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Talangsari Lampung 1989, Tragedi 1965, Tragedi 27 Juli 1996, Pembunuhan Munir.**